

Ontologi Islam Nusantara dalam Pendidikan Islam di Indonesia

Ubaidillah

STAI Ihyaul Ulum Gresik

Email: obeidbabrum@gmail.com

Abstrak

Di awal milenium kedua, Indonesia yang multi etnis dan multi agama, dan dikenal sebagai masyarakat yang toleran, sempat dikejutkan oleh beberapa kejadian bernuansa SARA. Kejadian-kejadian seperti ini, cukup mengganggu bagi bangsa Indonesia mengingat sejarah panjang identitas Indonesia sebagai bangsa yang toleran dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pendidikan memegang peran penting dalam membentuk sikap masyarakat, termasuk sikap toleran-intoleran. Hal ini dikarenakan salah satu fungsi dan tujuan pendidikan sebagai media transfer of knowledge dan transfer of values. Dengan menggunakan metode perpustakaan (library research) dan deskriptif, dan pengelolaan data dilakukan dengan proses mengedit, mengklasifikasikan, memverifikasi, menganalisis, dan menyimpulkan, penelitian ini berusaha menemukan jawaban atas berkembangnya intoleransi di Indonesia dengan menjajeksikan Islam Nusantara sebagai landasan pendidikan Islam di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam Nusantara dengan paradigmanya yang tawazun, tawasuth, dan tasamuh yang terbingkai dalam sikap keberagaman yang rahmatan lil 'alamin, dapat menjadi jawaban sebagai landasan ontologis pelaksanaan Pendidikan Islam. Dengan paradigma keseimbangan yang menjadi ciri Islam Nusantara, Pendidikan Islam tidak hanya diorientasikan untuk mengejar kepentingan ukhrowi yang justru sangat rentan ketika dihadapkan pada sesuatu yang dikemas dengan label agama.

Kata Kunci: *Ontologi, Islam Nusantara, Pendidikan Islam, Indonesia*

Pendahuluan

Di awal milenium kedua, Indonesia yang multi etnis dan multi agama, dan dikenal sebagai masyarakat yang toleran, sempat dikejutkan oleh beberapa kejadian bernuansa SARA. Sebuah fenomena sosial yang hampir menghancurkan tatanan harmoni yang sudah terbangun. Salah satu yang paling menonjol dari kejadian tersebut adalah menyeruaknya intoleransi bernuansa agama. Ujaran kebencian, pembatasan pada hak-hak kelompok minoritas, sampai terorisme menyeruak dalam ruang-ruang sosial, dan menjadi warna yang mengkhawatirkan keutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hasil survey yang dilakukan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia untuk memotret tingkat toleransi pada tahun 2019, diperoleh hasil bahwa tingkat toleransi masyarakat Indonesia berada pada angka 73,83. Dari segi angka menunjukkan sesuatu yang baik, karena dengan menggunakan rentang 0-100, hasil tersebut menunjukkan hasil yang baik dengan kategori tinggi. (Sila & Fakhruddin, 2020). Hal ini juga ditunjukkan rilis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), sebagaimana disampaikan oleh Direktur Pencegahan dalam diskusi publik di Kedutaan Besar Prancis, Jakarta pada tanggal 20 Juli 2022,

menunjukkan adanya penurunan dari 2019 di angka 38,4 persen, dan pada 2020 sampai 2021 turun di angka 12,2 persen.¹

Tetapi ada angka 26,175 responden yang dapat diasumsikan memiliki sikap intoleran. Dan sesuai data BNPT, masih ada 33 juta penduduk yang terpapar radikalisme. Untuk kondisi Indonesia yang plural, angka tersebut tetaplah perlu mendapat perhatian. Dengan kata lain, angka tersebut belum menunjukkan masyarakat Indonesia berada dalam keadaan baik dalam hal toleransi, mengingat Indonesia adalah negara yang memiliki paradigma kebangsaan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu suatu paradigma yang menjadi semboyan bangsa untuk hidup bersama dalam perbedaan, tanpa diskriminasi dan perbedaan hak dan kewajiban bagi semua golongan dan kelompok.

Pendidikan merupakan mesin pencetak pengetahuan dan sikap hidup terbesar dalam sejarah manusia. Melalui pendidikan, pengetahuan manusia dibangun, dan melalui pendidikan sikap manusia dibentuk. Dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan, bahwa fungsi dan tujuan pendidikan adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa, dan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi menjadi warga negara yang demokratis. (Undang-Undang, 2003). Para ahli sepakat, bahwa pendidikan merupakan media terjadinya proses alih pengetahuan (*transfer of knowledge*) dan proses alih nilai (*transfer of values*) dari pendidik kepada peserta didik. Bentuk pengetahuan dan nilai seperti apa yang diterima oleh peserta didik, sangat ditentukan oleh muatan yang terkandung dalam, dan cara yang digunakan dalam proses alih pengetahuan dan alih sikap ini. Dan secara keseluruhan, manusia pernah mengalami alih pengetahuan dan nilai melalui proses pendidikan, terlepas pendidikan formal, informal, dan non formal. Maka patut diasumsikan, bahwa pendidikan memiliki kontribusi besar terhadap merebaknya sikap intoleran yang berkembang di tengah masyarakat.

Beberapa penelitian menunjukkan, benih intoleransi, bahkan radikalisme mulai muncul sejak pelajar memasuki pendidikan tingkat SMP. Data Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) dari Oktober 2010 hingga Januari 2011 tentang tingkat intoleransi dan radikalisme di kalangan guru Pendidikan Agama Islam dan para pelajar di wilayah Jabodetabek menemukan 50 persen pelajar setuju tindakan radikal, 25 persen siswa dan 21 persen guru menyatakan Pancasila tidak relevan lagi. Sementara 84,8 persen siswa dan 76,2 persen guru setuju dengan penerapan

¹ Kompas TV, 2022, <https://www.kompas.tv/article/311315/bnpt-33-juta-penduduk-indonesia-terpapar-radikalisme-butuh-undang-undang-pencegahan>

Syariat Islam di Indonesia (<http://lipi.go.id>, 2016). Studi yang dilakukan Farcha Ciciek di tujuh kota (Jember, Padang, Jakarta, Pandeglang, Cianjur, Cilacap dan Yogyakarta) menemukan hal yang sama, yakni sekitar 13% siswa mendukung gerakan radikal dan 14% setuju dengan aksi terorisme.

Dari segi jumlah, sikap intoleransi yang berkembang di dunia pendidikan barangkali belum terlalu besar. Tetapi, sekitar 20-25% pelajar yang bersikap intoleran dan bersimpati kepada gerakan radikalisme, sesungguhnya adalah benih-benih yang kontra-produktif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Berkembangnya sikap intoleransi seperti ini, bisa jadi akibat peran sebagian guru (agama) yang seolah mendukung intoleransi, sehingga mendorong tumbuhnya sikap intoleransi di kalangan pelajar. Dari hasil wawancara mendalam diketahui sebagian pelajar merasa apa yang mereka lakukan sesuai dengan keyakinan yang mereka anut, sehingga berikap mengambil jarak dan bahkan melakukan persekusi kepada kelompok yang berbeda dianggap wajar dilakukan.²

Meskipun agama seringkali hanya dijadikan bungkus dari sikap intoleransi dan kekerasan yang terjadi, dan hanya sedikit kekerasan yang betul-betul terbukti dengan Agama, tetapi hasil survey menunjukkan ditemukannya berbagai narasi-narasi yang mengandung unsur kekerasan di dalamnya. Buku teks sejarah kebudayaan Islam masih perlu mengoptimalkan penekanan moderasi beragama dalam kompetensi inti dan kompetensi dasarnya.

Islam Nusantara, yang dipromosikan sebagai Islam yang ramah dan toleran dan sesuai dengan konteks Indonesia yang plural, diharapkan menjadi jawaban untuk mengatasi persoalan-persoalan berkembangnya sikap intoleransi di dunia pendidikan. Meskipun sejauh ini masih mendapatkan penentangan dari sebagian kalangan terkait terminologi yang digunakan, tetapi corak keberagaman yang moderat, toleran, dan menghargai perbedaan, yang dicirikan oleh Islam Nusantara patut dipertimbangkan dijadikan landasan ontologis Pendidikan Islam di Indonesia. Hal ini memiliki kesesuaian dengan corak bangsa Indonesia yang plural dan multi golongan, agama, keyakinan, dan adat istiadat. Sehingga orientasi Pendidikan Islam tidak hanya mengantarkan peserta didik untuk menguasai ilmu pengetahuan, tetapi memiliki sikap kebangsaan yang mengedepankan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Metode Penelitian

² Rahma Sugihartati, 2020, <https://news.unair.ac.id/2020/05/27/habitus-pendidikan-dan-intoleransi-di-kalangan-pelajar/?lang=id>

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah kepustakaan, yaitu penelitian yang menggunakan data-data atau bahan-bahan yang digunakan berasal dari perpustakaan, baik berupa buku, ensiklopedi, kamus jurnal, dokumen, majalah, dan lain sebagainya.³ Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif, yaitu metode analisis yang berupaya mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi pada masa sekarang dengan memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian untuk dideskripsikan apa adanya (Nana Sudjana dan Ibrahim 1989). Metode pengelolaan data dilakukan dengan proses mengedit, mengklasifikasikan, memverifikasi, menganalisis, dan menyimpulkan (Kartini Kartono, 1998)

Pembahasan

1. Ontologi

Dalam khazanah filsafat, ontologi disebut juga sebagai filsafat pertama, yaitu cabang filsafat yang menyelidiki pengandaian-pengandaian terdalam dan paling akhir dalam pengetahuan manusiawi. Berasal dari bahasa Yunani *on* yang merupakan bentuk netral dari *oon*, dengan bentuk genitif *ontos*.⁴ Pertama kali dincetuskan ontologi oleh Aristoteles, ketika ia berusaha mencari pemahaman yang meliputi baik dunia ide maupun dunia fisik. Mulanya ia sependapat dengan gurunya, Plato, untuk mencari kenyataan yang mengatasi dunia fisik yang empiris (*ta hyper ta physika*) dan yang melatarbelakangi dunia fisik (*ta meta ta physika*). Bagi Plato, yang mempunyai kenyataan yang sesungguhnya (*ontos on*) hanya dunia bukan fisik (*ta paradeigmata*, atau idea-idea), dunia fisik hanya bayangannya. Sedang bagi Aristoteles, dunia fisik juga memiliki kenyataan yang sesungguhnya.

Berdasar pada kegundahan tersebut, Aristoteles berusaha mencari pemahaman yang meliputi baik dunia ide maupun dunia fisik sekaligus. Dan lama kelamaan, *ta meta ta physika* tidak lagi disamakan dengan *ta hyper ta physika*. *Ta meta ta physika*, menurut Aristoteles memiliki cakupan yang lebih luas daripada *ta hyper ta physika*, sebab ia meliputi sekaligus *ta hyper ta physika* dan *ta physika*. Dari pemikiran Aristoteles ini, ontologi berkembang menjadi ilmu (baca: cabang filsafat) yang mempelajari hal yang paling hakiki dari segala sesuatu yang meliputi segala bidang (dimensi ekstensif) dan segala aspek (dimensi intensif). Dan dalam

³ Harahap, N. (2014). Penelitian Kepustakaan. *Jurnal Iqra'*, 4(1), 88–100.

⁴ Anton Bakker, (1992), *Ontologi atau Metafisika Umum*, Yogyakarta: Kanisius

perkembangannya, ontologi disamakan dengan metafisika itu sendiri, dengan sebutan metafisika umum.⁵

Dalam ilmu pengetahuan, ontologi merupakan salah satu pilar utama yang mendahului epistemologi dan aksiologi.⁶ Ontologi merupakan pengkajian teori tentang “ada” (*being*), yaitu sesuatu yang memiliki sifat tetap dan tak berubah, dan menjadi sumber dari segala yang mengada. Ontologi adalah ilmu yang membahas tentang sumber asal dari apa yang hendak diketahui, yang dapat menentukan arah pengetahuan itu sendiri.

Jadi, ontologi adalah sebuah kajian tentang sumber dan asal dari segala yang *mengada*, yang substansinya memiliki sifat tetap dan tidak berubah. Ia meliputi segalanya, baik fisik maupun *idea*. Penyamaan ontologi dengan metafika umum menandakan, sesuatu yang menjadi ontologi dari *sesuatu* memiliki sifat yang tetap dan berubah. Ia melatarbelakangi segala yang *ada*, menjadi dasar dan landasan yang menentukan bentuk dan arah sesuatu yang *ada*.

2. Islam Nusantara

Ketika Islam pertama kali diturunkan di tanah Arab, tepatnya di Hijaz, sudah ada masyarakat dengan kebudayaannya yang berdiam di sana. Hijaz bukanlah ruang kosong. Ada sekian banyak kepercayaan dan kelompok-kelompok kesukuan yang sudah turun temurun menghuni dan menetap dengan segala adat istiadat dan kebudayaannya. Islam datang untuk menyapa mereka untuk membangun sebuah peradaban baru dengan mengadopsi dan berakulturasi dengan budaya dan adat istiadat yang ada, mempertahankan budaya tersebut, memeperbaikinya, dan membuang yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam.

Setelah keluar dari Hijaz, Islam juga bertemu dengan aneka budaya dan peradaban yang sudah mapan. Ada peradaban Sasanid yang berpusat di Persia dan peradaban Romawi Timur yang berpusat di Konstantinopel. Melalui perjumpaan dengan peradaban-peradaban besar inilah, Islam membangun peradabannya yang menjulang mulai abad ketujuh sampai abad ketiga belas.

Ketika Islam masuk nusantara, sudah terdapat peradaban yang berkembang maju, Singosari, Sriwijaya, Sunda, dan Majapahit adalah kerajaan-kerajaan dengan peradabannya yang tinggi. Butuh berabad-abad dan beraneka macam saluran damai, seperti perdagangan, perkawinan, tarekat, dan pendidikan sampai Islam betul-betul mampu menancapkan akar guna membangun peradabannya. Akulturasi dan cara damai yang dilakukan para penyebar

⁵ Jan Hendrik Rapar, 1996, Pengantar Filsafat, Yogyakarta: Kanisius

⁶ Jujun S. Suraisumantri, (1983), Ilmu dalam Perspektif, Jakarta: PT. Gramedia.

Islam awal di bumi nusantara menjadi kunci sehingga Islam dapat membumi, dan saat ini menjadi mayoritas di nusantara. Para penyebar Islam, mencoba melakukan akulturasi dengan budaya dan adat istiadat yang ada di nusantara dengan melakukan adaptasi dan akomodasi terhadap budaya dan adat istiadat tersebut. Dengan cara seperti inilah, Islam dapat memiliki akar kuat di bumi nusantara dan menjadi kelompok keagamaan dengan jumlah pemeluk terbesar dengan warna dan corak khas yang berbeda dengan Islam di tempat lain, yaitu Islam Nusantara.⁷

Perbedaan ini seringkali juga menimbulkan masalah di internal Islam, dengan menganggap bahwa Islam yang memiliki corak lokal adalah Islam yang menyimpang dan tidak otentik. Anggapan seperti ini kemudian melahirkan gerakan-gerakan purifikasi yang berupaya membersihkan wajah Islam dari unsur-unsur lokal. Padahal keanekaragaman corak dan warna Islam bukanlah bentuk perubahan terhadap substansi, tapi perubahan pada tampilan sebagai implikasi dari akulturasi dan asimilasi antara Islam dengan budaya-budaya yang ditemuinya dalam perjalannya menyebar ke luar dari tanah Hijaz, termasuk juga ketika Islam masuk ke bumi nusantara.

Di Indonesia sendiri, kenusantaraan Islam mendapatkan penentangan dan disumsikan sebagai aliran baru Islam oleh sebagian kalangan. Penambahan kata *nusantara* di belakang kata *Islam* menjadi problem yang diperdebatkan, dan dipandang sebagai bentuk aliran baru dalam Islam yang sudah “keluar” dari Islam secara umum. Bagi yang mendukung, penambahan kata nusantara menunjuk pada Islam yang ada di nusantara yang memiliki corak dan warna tersendiri yang membedakan dengan Islam di tempat lain.

Titik tolak perdebatan tentang Islam Nusantara terjadi ketika Nahdhatul Ulama mempopulerkan istilah ini pada Muktamar ke-33 di Jombang, Jawa Timur. Sebelumnya, praktik Islam *ala nusantara* hanya mendapat tuduhan sebagai prantik keagamaan yang berbau *tabayyul*, *bid'ah*, dan *keburafat*. Tapi sejak “dideklarasikan pada Muktamar ke-33 ini, Islam Nusantara dipandang sebagai bentuk baru aliran kepercayaan dalam Islam. Jika melihat perdebatan yang muncul, persoalan sebetulnya hanya pada tataran penggunaan istilah, dan bukan pada substansi dari Islam Nusantara itu sendiri. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Oman Fathurrahman, yang mendefinikan Islam Nusantara sebagai Islam yang empirik dan distingtif sebagai hasil interaksi, kontekstualisasi, indigenisasi, penerjemahan, vernakularisasi

⁷ Nor Huda, (2007), Islam Nusantara, Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indoensia, Yogyakarta:Ar-Ruzz Media.

Islam universal dengan realitas sosial, budaya, dan sastra di Indonesia, dan bukan Islam yang normatif.⁸

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Sokhi Huda dengan mengutip Michel Laffan yang mengatakan, bahwa Islam Nusantara adalah narasi besar Islam yang merentang selama ratusan tahun di bumi Nusantara, yang memiliki akar-akar sejarah yang mencakup jauh ke masa silam. Islam nusantara tidak lain merupakan salinan dari sejarah Islam di Nusantara, dan bukan aliran semapalan (*firqah*) yang mencoba memekarkan diri dari kelompok keislaman yang ada di Nusantara.

Jadi Islam Nusantara, secara normatif adalah Islam yang sama dengan diajarkan oleh nabi Muhammad, yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits. Yang membedakan adalah kelompok Islam yang lain adalah epistemologinya. Hal ini dikarenakan Islam Nusantara adalah metode berfikir (*manhajul fikr*) *ablussunnaah wal jama'ah* yang diadopsi oleh Nahdhatul Ulama, yaitu *tawazun* (seimbang), *tawassuth* (moderat), dan *tasamub* (toleran). Dengan metode berpikir seperti ini, Islam Nusantara dapat menampilkan wajah Islam yang ramah terhadap budaya dan tradisi lokal, toleran, dan akomodatif.⁹

Metode berpikir diatas, menjadi karakter berislam yang mengedepankan konsep *rahmatan lil 'alamin*, yaitu sebuah konsep relasi antar manusia dengan manusia dalam bingkai *ukhuwwah islamiyah* (persaudaraan sesama muslim), *ukhuwwah wathaniyah* (persaudaraan sebangsa), dan *ukhuwwah basyarariyah* (persaudaraan antar manusia).

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Islam Nusantara bukanlah aliran (*firqah*) dalam Islam. Islam Nusantara merupakan konsep tentang Islam yang hidup di bumi Nusantara yang memiliki akar sejarah ke masa lampau, sebuah corak Islam yang merupakan hasil interaksi, kontekstualisasi, indigenisasi, penerjemahan, vernakularisasi Islam universal dengan realitas sosial, budaya, dan sastra yang ada di Indonesia. Islam Nusantara merupakan jawaban atas kebutuhan Indonesia sebagai negara yang plural dan multi etnis. Cara berislam seperti menjadi landasan bagi Islam Nusantara dalam memandang dirinya dan memandang kelompok lain di luar dirinya, yaitu sebuah Islam yang ramah dan menyanyangi sesama dalam bingkai persaudaraan.

3. Pendidikan Islam di Indonesia

⁸ NU.Or.Id., 2015, <https://www.nu.or.id/nasional/apa-yang-dimaksud-dengan-islam-nusantara-QloHO>

⁹ Aminuddin, L. H., & Ulfah, I. (2021). Epistemology of Islam Nusantara: Transformation of Islamic Legal Thought in Nahdlatul Ulama (NU). *Justicia Islamica*, 18(2), 355–374. <https://doi.org/10.21154/justicia.v18i2.3095>

Salah satu media dakwah yang dipakai oleh para penyebar Islam di Nusantara adalah pendidikan. Pemilihan pendidikan sebagai media dakwah terbukti efektif dalam menyebarkan Islam, karena dengan pendidikan, para penyebar Islam awal dapat langsung mentransformasikan ajaran-ajaran Islam kepada murid-muridnya. Setelah dianggap cukup mumpuni, murid-murid tersebut menyebarkan apa yang didapat dari gurunya kepada masyarakat tempat mereka tinggal. Dengan cara seperti ini lambat lain Islam dapat masuk ke pelosok-pelosok nusantara.

Pola penyebaran Islam melalui pendidikan terus dilakukan sehingga lembaga-lembaga pendidikan Islam berkembang seperti saat ini. Hanya saja, belakangan pendidikan Islam menghadapi problem pada dirinya, terutama terkait tata nilai yang mendasarinya dan orientasi yang hendak dituju. Kemunduran peradaban Islam dan penetrasi nilai-nilai Barat disinyalir menjadi penyebab dari situasi ini.

Upaya mengejar keterbelakangan dan ketertinggalan dari dunia Barat dengan menggunakan strategi mengadopsi sistem dan tata nilai Barat dengan meletakkan model kapitalisme sebagai kiblat telah menyebabkan pendidikan Islam menghadapi persoalan akut dengan terjadinya krisis nilai, dan ikut menyumbang *output* terciptanya masyarakat yang hedonis, individualis, dan materialis.¹⁰ Pendidikan Islam seolah kehilangan arah dan tidak berdaya ketika dihadapkan dengan realitas perkembangan masyarakat industri modern. Pelaksanaan pendidikan Islam menjadi sangat tergantung dengan peradaban modern dan hanya mampu menyesuaikan diri dengan kecenderungan pendidikan yang lebih berorientasi materialistik dalam segala aspeknya.

Penetrasi sistem dan tata nilai kapitalistik ke dalam pendidikan Islam di Indonesia semakin diperparah dengan munculnya sekularisasi pendidikan, yaitu dengan munculnya dikotomi ilmu agama dan ilmu non-agama. Dikotomi ini telah melahirkan ilmuwan-ilmuwan yang kurang memiliki tanggung jawab terhadap kehidupan masyarakat dan lingkungan, dan ahli-ahli agama yang kurang memiliki kepekaan terhadap kehidupan sosial, dan gagap terhadap perkembangan dunia modern. Agama seakan terlepas dari realitas sosial (Bisyri, 2009). Padahal merunut ke belakang, ketika peradaban Islam menjadi kiblat dunia, tidak ada pemisahan ada antara ilmu agama dengan ilmu non-agama (ilmu umum). Para ilmuwan Muslim merupakan sosok-sosok ilmunan sekaligus agamawan. Demikianlah misalnya, Ibnu

¹⁰ Sarkowi, 2011, *Labirin Pendidikan Islam, Menakar Konsepsi Pemikiran Pendidikan Al-Ghazali dalam Reorientasi Pendidikan Islam*, Malang: Resist Literacy

Sina, di samping sebagai ilmuwan di bidang medis, juga seorang agamawan, Ibnu Khaldun di samping sebagai Sosiolog, juga seorang agamawan, dan seterusnya.

Secara normatif, Islam sangat memuliakan ilmu, hal ini dikarenakan *ilmu* menempel pada salah satu sifat Tuhan, yaitu *Al-'Alim*. Syed M. Naquib Al-Attas (Alfi, 2018), mengatakan, bahwa konsep ilmu dalam Islam terbagi menjadi dua, *pertama* yaitu ilmu yang datang dari Allah dan diberikan kepada manusia sebagai karunia-Nya. Dan yang *kedua* adalah ilmu yang didapat melalui capaian jiwa yang aktif dan kreatif berdasarkan daya usaha akliahnya sendiri, yang telah melalui pengalaman, penyelidikan dan pengkajian. Hal ini mengindikasikan, bahwa konsepsi ilmu dalam Islam tidak murni berasal dari upaya akliah manusia, tetapi juga berasal dari Allah. Hal ini berbeda dengan konsep Barat tentang ilmu sebagai murni berasal dari upaya manusia. Akibat dari penetrasi sistem dan tata nilai Barat ke dalam pendidikan Islam, maka pendidikan Islam kehilangan orientasi keislamannya, yaitu sebuah model pendidikan yang seharusnya berorientasi transendental, menjadi model pendidikan yang berorientasi pada hal-hal yang bersifat *profane*.¹¹

Menurut Sarkowi (2011), penisbatan kata *Islam* pada kata *pendidikan*, seharusnya menjadi penegas adanya perbedaan dengan *pendidikan* yang lain. Penambahan kata *Islam* setelah *pendidikan* mengindikasikan bahwa Islam memiliki konsep tersendiri dalam masalah pendidikan. Tetapi, penetrasi tata nilai Barat yang sekuler telah menyebabkan lahirnya dikotomi ilmu dalam Islam. Ilmu agama ditempatkan sebagai ilmu *ukhrowi* dan ilmu umum sebagai ilmu *duniawi*. Dan sebagaimana diketahui, secara normatif, Islam menempatkan urusan akhirat lebih utama daripada urusan dunia.

Cara dikotomis terhadap ilmu telah melahirkan praktek pendidikan yang kurang memiliki kepekaan terhadap kemaslahatan masyarakat. Dengan menganggap ilmu agama merupakan ilmu *ukhrowi an sich*, praktik pendidikan agama hanya diorientasikan pada kepentingan-kepentingan akhirat, akibatnya kepentingan-kepentingan yang bersifat "*duniawi*" hanya sebagai pelengkap yang dapat dikesampingkan. Asumsi inilah yang kemudian melahirkan praktik yang menempatkan kepentingan "agama" berada di atas kepentingan yang lain.

Meningkatnya semangat keberagamaan di milenia kedua ini, dan berkembangnya dikotomisasi ilmu di kalangan umat Islam, menjadi salah faktor tercerabutnya pendidikan Islam dari persoalan-persoalan keseharian. Sehingga tidak mengherankan, ketika agama

¹¹ Tolchah, M. (2015). *Filsafat Pendidikan Islam: Knstruksi Tipologis dalam Pengembangan Kurikulum*. 11(2), 381–398.

disandingkan dengan yang non agama, yang dikedepankan adalah yang memiliki atribut agama. Maka tidak mengherankan, survey yang dilakukan oleh Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) mulai Oktober 2010 hingga Januari 2011 menghasilkan data tentang berkembangnya tingkat intoleransi dan radikalisme di kalangan guru Pendidikan Agama Islam dan para pelajar di wilayah Jabodetabek. Sebanyak 24,5% guru dan 41,1% siswa memiliki kesediaan untuk melakukan pengrusakan dan penyegelan rumah ibadah bermasalah; 22,7% guru dan 51,3% siswa, bersedia melakukan pengrusakan rumah atau fasilitas anggota keagamaan sesat; 28,1% guru dan 58,0% siswa, bersedia melakukan pengrusakan tempat hiburan malam; 32,4% guru dan 43,3% siswa, bersedia melakukan pembelaan dengan senjata terhadap umat Islam dari ancaman agama lain; dan sebanyak 23,8% guru dan 13,4% siswa, setuju terhadap ide dan tindakan tokoh-tokoh radikal. Studi yang dilakukan Farcha Ciciek di tujuh kota (Jember, Padang, Jakarta, Pandeglang, Cianjur, Cilacap dan Yogyakarta) juga menemukan hal yang sama, yakni sekitar 13% siswa mendukung gerakan radikal dan 14% setuju dengan aksi terorisme.

Fenomena intoleransi di kalangan pelajar dan guru Pendidikan Agama Islam, juga terjadi di lembaga-lembaga Pendidikan Islam. Pondok pesantren yang merupakan lembaga pendidikan Islam *par excellent* – sempat dikaitkan dengan radikalisme dan ekstremisme yang terjadi di Indonesia. Beberapa pondok pesantren diindikasikan ikut mendukung radikalisme dan ekstremisme.¹² Meskipun indikasi tersebut bersifat kasuistik dan tidak merepresentasikan seluruh pondok pesantren dan lembaga pendidikan Islam yang ada di Indonesia, tapi hal itu mengusik pertanyaan apakah pondok pesantren dan lembaga pendidikan Islam hanya dijadikan alat untuk menyebarkan paham radikal dan ekstrem? Ataukah ada materi-materi tertentu yang diajarkan di pondok pesantren dan lembaga pendidikan Islam yang memiliki potensi munculnya benih radikalisme dan ekstremisme dari rahim pendidikan Islam?

Tampaknya, problem intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme yang memiliki kaitan dengan Pendidikan Islam, perlu mendapatkan perhatian cukup serius. Beberapa pelaku intoleransi dan radikalisme yang terindikasi memiliki kaitan dengan lembaga Pendidikan Islam, dan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam patut memunculkan kecurigaan adanya yang salah dengan sistem, landasan, dan muatan Pendidikan Islam. Islam Nusantara sebagai metode berpikir keislaman yang mengedepankan konsep keberagamaan

¹² Cnnindonesia, 2016, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160203201841-20-108711/bnpt-19-pesantren-terindikasi-ajarkan-radikalisme>

yang *rahmatan lil 'alamin* dengan mengedepankan sikap *tawazun*, *tawasuth*, dan *tasamuh* perlu mendapatkan atensi sebagai dasar dan landasan pelaksanaan Pendidikan Islam. Dengan sistem nilai, sebagaimana yang ditawarkan oleh Islam Nusantara, Pendidikan Islam dapat berjalan di atas rel yang memiliki kesesuaian dengan kebutuhan keindonesiaan yang plural, juga kebutuhan global yang ditandai dengan semakin mengerasnya hubungan antar kelompok dan antar negara.

Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan, bahwa Pendidikan Islam di Indonesia sedang menghadapi problem yang cukup serius. Munculnya fenomena intoleransi di kalangan peserta didik dan guru Pendidikan Agama Islam, dan adanya kaitan sebagian lembaga Pendidikan Islam dengan intoleransi dan radikalisme menunjukkan adanya yang bersifat ontologis dalam pelaksanaan Pendidikan Islam, yaitu sebuah krisis yang telah melahirkan cara pandang dan orientasi dari pelaksanaan Pendidikan Islam.

Islam Nusantara dengan paradigmanya yang *tawazun*, *tawasuth*, dan *tasamuh* yang terbingkai dalam sikap keberagaman yang *rahmatan lil 'alamin*, dapat menjadi jawaban sebagai landasan ontologis pelaksanaan Pendidikan Islam. Hal ini dikarenakan, salah satu problem yang melingkupi Pendidikan Islam adalah dikomisasi ilmu agama dan ilmu non agama yang telah menyebabkan lahirnya sikap lebih mementingkan kepentingan *ukhrowi* daripada kepentingan *duniawi*. Dengan paradigma keseimbangan yang menjadi ciri Islam Nusantara, setidaknya problem ini dapat teratasi. Dan Pendidikan Islam tidak hanya diorientasikan untuk mengejar kepentingan *ukhrowi* yang justru sangat rentan ketika dihadapkan pada sesuatu yang dikemas dengan label agama.

Daftar Pustaka

- Alfi, L. A. (2018). Konsep Ilmu Menurut Syed Muhammad Naquib Al-Attas (Analisis buku Islam Dan Filsafat Sains). *Tasfiah*, 2(2), 195. <https://doi.org/10.21111/tasfiah.v2i2.2580>
- Aminuddin, L. H., & Ulfah, I. (2021). Epistemology of Islam Nusantara: Transformation of Islamic Legal Thought in Nahdlatul Ulama (NU). *Justicia Islamica*, 18(2), 355–374. <https://doi.org/10.21154/justicia.v18i2.3095>
- Bisyri, M. H. (2009). Mengakhiri Dikotomi Ilmu Dalam Dunia Pendidikan. *Forum Tarbiyah*, 7(2), 181–194.
- Harahap, N. (2014). Penelitian Kepustakaan. *Jurnal Iqra'*, 4(1), 88–100.

- Sila, M. A., & Fakhruddin. (2020). Indeks kerukunan umat beragama 2019. In *Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar* (Vol. 19).
- Tolchah, M. (2015). *Filsafat Pendidikan Islam: Knstruksi Tipologis dalam Pengembangan Kurikulum*. 11(2), 381–398.
- Anton Bakker, (1992), *Ontologi atau Metafisika Umum*, Yogyakarta: Kanisius
- Jan Hendrik Rapar, 1996, *Pengantar Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius
- Jujun S. Suraisumantri, (1983), *Ilmu dalam Perspektif*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Kartini Kartono, (1998), *Pengantar Metodologi Research*, Bandung: ALUMNI.
- Nor Huda, (2007), *Islam Nusantara, Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indoensia*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. \
- Sarkowi, 2011, *Labirin Pendidikan Islam, Menakar Konsepsi Pemikiran Pendidikan Al-Ghazali dalam Reorientasi Pendidikan Islam*, Malang: Resist Literacy
- Sudjana Nana dan Ibrahim, (1989), *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, Bandung: Sinar Baru Bandung.
- Syaikh Shafiurrahman Al-Murakfuri, (2012), *Sirah Nabawi*, Jakarta Timur: Pustaka AlKautsar.
- LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 430, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Cnnindonesia, 2015, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150730142952-20-69107/muktamar-nu-antara-islam-nusantara-dan-peradaban-dunia>
- Cnnindonesia, 2016, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160203201841-20-108711/bnpt-19-pesantren-terindikasi-ajarkan-radikalisme>
- Kompas TV, 2022, <https://www.kompas.tv/article/311315/bnpt-33-juta-penduduk-indonesia-terpapar-radikalisme-butuh-undang-undang-pencegahan>.
- LIPI, 2016, <http://lipi.go.id/berita/single/Anak-anak-muda-Indonesia-makin-radikal/15089>
- NU.Or.Id., 2015, <https://www.nu.or.id/nasional/apa-yang-dimaksud-dengan-islam-nusantara-QloHO>
- Rahma Sugihartati, 2020, <https://news.unair.ac.id/2020/05/27/habitus-pendidikan-dan-intoleransi-di-kalangan-pelajar/?lang=id>
- Researchgate, 2019, https://www.researchgate.net/publication/334084547_Sketsa_Kajian_Islam_Nusantara_dalam_Perspektif_Filsafat_Ilmu
- UII.ac.id, 2022, <https://www.uii.ac.id/menyoal-radikalisme-dan-pendidikan-agama/>